

## PDIP Targetkan 12 Kursi di DPRD Salatiga

**SALATIGA (KR)** - DPC PDIP Salatiga menargetkan mendapatkan 12 kursi di DPRD Salatiga pada Pileg 20-24 mendatang. Pernyataan tersebut ditegaskan Ketua DPC PDIP Salatiga, Dance Ishak Palit di sela-sela pendaftaran bakal calon legislatif (Bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Salatiga, Kamis (11/5). "Target kita minimal 12 kursi di DPRD Salatiga," kata Dance Ishak Palit kepada wartawan. PDIP Salatiga mendaftarkan 25 bakal calon anggota DPRD (legislatif) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka datang ke kantor KPU berjalan kaki dari Kantor DPC PDI Perjuangan di Pendem Salatiga diantar oleh ratusan kader partai dan diiringi musik drumblek.

Ketua DPC PDI Perjuangan Dance Ishak Palit mengatakan mengajukan sebanyak 25 bacaleg terdiri 15 laki-laki dan 10 perempuan. "Kami datang ke KPU untuk mendaftarkan 25 bacaleg. PDIP partai ketiga yang mendaftar ke KPU. Ini sesuai nomor urut PDI Perjuangan," kata Dance Ishak Palit. Terkait dengan melibatkan kelompok drumblek dan kirab saat menuju Kantor KPU Salatiga, Dance mengatakan, Salatiga identik dengan kota budaya. Sebab itu, pendaftaran bacaleg PDI Perjuangan tidak meninggalkan unsur budaya. Ketua KPU Salatiga Syaemuri mengatakan, berdasarkan hasil verifikasi, berkas administrasi 25 bacaleg PDI Perjuangan dinyatakan telah memenuhi syarat. (Sus)-f

## Nelayan Juwana Demo Keberatan PP 11/2023

**PATI (KR)** - Ribuan nelayan Juwana menggelar aksi demo ke kantor Bupati Pati. Mereka keberatan dan menolak isi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT), Rabu (10/5). "Ini merupakan demo ke lima. PP 11/2023 terlalu memberatkan nelayan". Demikian ditegaskan salasatu pengurus pusat Front Nelayan Bersatu (FNB), Hadi Sutrisno SE.

Pendemo juga membawa aneka spanduk yang intinya menolak isi PP 11/2023. Diantaranya bertulisan 'Tolak Denda 1000 persen', 'Jika tidak bisa membantu jangan mengganggu', dan 'Kami minta WPP 713 Kembali'. Bahkan ada pendemo yang membawa keranda hingga pocong sebagai simbol PP Nomor 11 Tahun 2023 membuat nelayan Juwana menderita. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pati, Rasmijan mengatakan PP nomor 11 tahun 2023 merupakan pelanggaran dan tidak manusiawi. "Masak denda sampai 1000 persen," keluhnya.

Dijelaskan, beberapa poin tuntutan nelayan Pati kepada pemerintah pusat. Yakni soal kapal yang melakukan penangkapan ikan di zona PIT wajib mendaratkan ikan hasil tangkapan di zona tersebut. "Peraturan ikan hasil tangkap zona PIT ini sangat memberatkan. Karena harus bongkar di daerah penangkapan setempat, sedangkan pemerintah belum bisa memfasilitasi. Kita harus bongkar di wilayah penangkapan masing-masing, siapa yang mau beli, kalau mau beli harga berapa," ucap Rasmijan. "Peraturan yang memberatkan nelayan wajib dibatalkan. Jika tuntutan tidak dipenuhi, massa nelayan akan menggelar unjukrasa yang lebih besar ke Jakarta" tegasnya.

Seorang pendemo, Siswo Purnomo menyatakan kuota penangkapan ikan terukur dengan sistem kuota, disinyalir dapat diberikan kelompok tertentu atau pemodal asing. "Kelompok oligarki usaha perikanan tangkap dan membuka ruang untuk penguasaan laut dalam jangka waktu 30 tahun, atau sesuai masa berlaku SIUP," ujarnya. Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Pati Henggar Budi Anggoro ST MT yang didampingi ketua DPRD Ali Badrudin SE berjanji akan menyampaikan tuntutan nelayan kepada pemerintah pusat. "Mudah-mudahan tujuh tuntutan nelayan Pati, segera dapat diselesaikan di tingkat pusat" kata Henggar Budi Anggoro di hadapan pendemo. (Cuk)-f

## PDIP Klaten Daftar ke KPU Diiringi Kesenian Reog

**KLATEN (KR)** - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Klaten, mendaftarkan sebanyak 50 bakal calon legislatif (Bacaleg) ke KPU Klaten, Kamis (11/5). Pendaftaran dipimpin Ketua DPC PDIP Sri Mulyani diiringi dengan kesenian reog. Sri Mulyani mengemukakan, Bacaleg yang didaftarkan sebanyak 50 orang, dan telah memenuhi kuota 40 persen perempuan. Dari jumlah tersebut ditargetkan sebanyak 33 orang bisa menduduki kursi legislatif. Sebanyak 50 Bacaleg tersebar di lima daerah pemilihan.

Sri Mulyani menegaskan, setelah didaftarkan di KPU dan berkas dinyatakan lengkap, pihaknya meminta para bakal calon legislatif untuk langsung terjun dan merangkul masyarakat. "Harus langsung terjun ke bawah, tunjukkan bahwa PDI Perjuangan adalah partainya wong cilik. Harus selalu hadir di tengah-tengah masyarakat baik suka maupun duka," kata Sri Mulyani.

Pendaftaran diiringi reog, karena reog salah satu seni budaya yang tidak lekang oleh waktu. Selalu meriah dan selalu disukai semua kalangan. "Kita tampilan reog asli punya Klaten. Ada tari Gedrug dari Kemalang juga. PDIP partai yang menyukai seni budaya, yang selalu melibatkan semua unsur dan potensi di wilayah masing-masing," jelas Sri Mulyani.

Selain memenuhi kuota 40 persen, juga telah diwarnai keikutsertaan milenial sekitar 20 persen. Menurut Sri Mulyani kaum milenial akan lebih sigap, namun untuk yang senior juga memiliki pengalaman jam terbang yang lebih banyak. "Kami lengkapi dari unsur perempuan, milenial, senioritas, kalangan tokoh, semuanya masuk dalam Bacaleg PDI Perjuangan. Selain itu juga ada beberapa Bacaleg dari kalangan kepala desa. Mereka tokoh luar biasa, karena sudah tiga periode menjadi kepala desa," tambah Sri Mulyani. (Sit)-f



KR-Sri Warsiti  
Sri Mulyani dan para Bacaleg bersama seniman reog.

## Lewat PDIP, Dua Kades Daftar Jadi Bacaleg

**WONOGIRI (KR)** - Sesuai nomor urutnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Wonogiri menjadi partai ketiga yang mendaftarkan 50 bacaleg Pemilu 2024 ke kantor KPUD Wonogiri, Kamis (11/5) sore. Dari 28 anggota DPRD Wonogiri yang ada selama ini terdapat empat legislator yang tidak mencalonkan diri.

Kedatangan 50 bacaleg DPRD PDIP Wonogiri yang diantar langsung Ketua DPC yang juga Bupati Wonogiri Joko Sutopo bersama Sekretaris DPC Setyo Sukarno yang juga Wakil Bupati Wonogiri, diterima oleh Ketua KPU Daerah setempat Toto Sihsetyo Adi didampingi seluruh komisio-

Dalam pemeriksaan berkas-berkas pencalonan, KPUD Wonogiri menyebutkan lengkap dan akan diujikan tahap selanjutnya. "Terima kasih setelah kami cek dan teliti berkasnya sudah lengkap, ini akan kami tindaklanjuti proses selanjutnya," kata Toto.

Saat digelar sesi jumpa pers di kantor KPU usai pendaftaran, Ketua PDI Perjuangan Wonogiri menyebutkan empat kader penting yang tidak masuk bursa bacaleg DPRD Wonogiri adalah Setyo Sukarno (Baturetno), H Tarso SIP (Bulukerto), Ari Santoso (Purwanto) dan Mulyadi SE MM dari Manyaran.

"Dua nama terakhir (Mulyadi dan Ari Santoso) karena yang bersangkutan akan

mencalonkan diri sebagai bacaleg DPRD Jateng, sedangkan Pak Setyo (Setyo Sukarno) karena beliau menjabat Wakil Bupati," terang pria yang akrab disapa Jekek.

Menurutnya, 50 bacaleg yang didaftarkan ke KPU siap mengikuti kontestasi dalam Pemilu 2024 beradu program dengan bacaleg parpol lain yang ada di daerahnya. "Mereka ini sudah mengikuti proses seleksi internal partai dan kami nyatakan layak dan kredibel maju sebagai calon wakil rakyat," kata Jekek.

Ditambahkan, dari 50 bacaleg yang didaftarkan ke KPUD itu terdapat dua kepala desa (Kades) yang kini masuk partai berlabang moncong putih. "Partai kami

terbuka bagi siapapun mesti dari eksternal partai boleh dan sah-sah 'nyaleg' lewat PDIP asal siap mengikuti AD/ART partai," tukas Joko Sutopo didampingi Sekretaris DPC Setyo Sukarno.

Menjawab pertanyaan wartawan Ketua DPC PDIP yang juga Bupati Wonogiri mengaku tidak pasang target perolehan suara dalam

Pemilu 2024. "Berapa perolehan kursi nanti bertambah atau berkurang kami tidak bisa menyebutkan di sini, semua masih tidak bisa ditebak karena dalam dunia politik ini yang ada kan cuma ketidakpastian," paparnya sembari menambahkan ini semua terserah rakyat yang menentukan pilihan. (Dsh)-f



KR-Djoko Santoso HP  
Pengurus DPC PDIP Wonogiri mengajukan bacaleg di KPU setempat.

## Polda Jateng Siap Amankan Tahapan Pemilu

**SEMARANG (KR)** - Kepolisian Daerah (Polda) Jateng dan polres-polres jajaran total menurunkan 1.037 personel untuk mengamankan tahapan Pemilu 2024, Jumat (12/5).

"Lokasinya sebanyak 36 dari 35 satuan kewilayahan (satwil) jajaran Polda Jateng," ungkap Kepala Bidang Humas Polda Jateng Kombes Pol M Iqbal Alqudusy dalam keterangan pers.

Disebutkan diantara kegiatan pengamanan tahapan Pemilu ini; di wilayah Polresta Semarang ada 2 lokasi yakni di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah dan KPU Kota Semarang. Di 2 lokasi itu total diturun-

kan 143 personel. Sasaran pengamanan meliputi; komisioner KPU, pegawai KPU, gedung KPU, kendaraan bermotor yang ada di kantor KPU, berkas pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg), kegiatan pengajuan bacaleg hingga ketua dan pengurus parpol serta pendukungnya.

"Beberapa Kantor KPU telah menerima pendaftaran bakal calon legislatif sejak Kamis (11/5), pengamanan dilakukan oleh Pol-

res setempat. Hari ini (Jumat) pengamanan juga digelar di 5 Kabupaten dan 1 Kota," tambahnya. Iqbal menegaskan seluruh personel Polri di jajaran Polda Jateng dan satwil untuk tidak sembarangan mengupload foto bersama bacaleg ataupun tokoh politik di media sosial (medsos).

Ini untuk tetap menjaga netralitas Polri pada setiap tahapan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang.

"Ini selaras dengan arahan Kapolri dan Kapolda Jateng agar seluruh personel Polri tetap menjaga sikap netralitas dalam mengawal Pemilihan Umum (Pemilu)

dan Pilkada serentak 2024," tuturnya. Kehadiran Polri dalam setiap tahapan Pemilu, jelas Iqbal, hanya sebatas melakukan pengamanan berdasar surat perintah tugas. Dokumentasi yang dilakukan hanya sebatas keperluan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada masing-masing pimpinan, tidak untuk dipublikasi di medsos pribadi.

"Setiap pelanggaran anggota Polri yang diduga melakukan hal yang mengarah ketidaknetralan gelaran Pemilu akan disanksi tegas, mulai hukuman disiplin maupun kode etik Polri," ungkap M Iqbal. (Cry)-f

## Tak Ada Ruang untuk Pelanggaran Lalin

**MAGELANG (KR)** - Terhitung pada Januari hingga April 2023, tercatat 397 ada kasus kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas tersebut, didominasi terjadi akibat kesalahan pengendaraan. Setiap kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan adanya pelanggaran peraturan lalu lintas.

Kapolresta Magelang Kombes Pol Ruruh Wicaksono SIK SH MH, melalui Kasat Lantas Polresta Magelang Kopol Agus San-

toso SE SIK MH, Jumat (12/5), memerintahkan jajarannya untuk tidak pandang bulu dan menindak secara tegas setiap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukumnya. Kasat Lantas juga menegaskan untuk giat penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas masih terus optimalkan, baik melalui tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) maupun tilang manual. "Selain penindakan pelang-

garan kasat mata secara manual, Satlantas Polresta Magelang juga masih memperlakukan sistem tilang elektronik," ungkap Agus.

Dalam sehari, lanjutnya, penindakan dengan ETLE oleh Satlantas Polresta Magelang dapat mencapai 400 kasus. Untuk mencapai hasil tersebut perangkat ETLE Statis berupa CCTV di pasang di ruas-ruas jalan rawan pelanggaran Lalu Lintas di wilayah Hukum Polresta Magelang. Selain itu, Satlantas Polresta Magelang membekali setiap personilnya dengan perangkat mobile ETLE, sehingga hasilnya lebih optimal.

Selain kegiatan represif dengan menggunakan ETLE, Satlantas Polresta Magelang juga meningkatkan kegiatan preemtif seperti memberikan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat, serta meningkatkan kegiatan preventif seperti pengaturan, penjagaan, pengawasan dan patroli di jalan-jalan protokol. (Tha)-f



KR-Thoha  
Satlantas Polresta Magelang menyediakan loket khusus Pelayanan ETLE di Mako Polresta Magelang.

## Menteri ATR/BPN Serahkan UGR 50 Bidang Tanah

**SEMARANG (KR)** - Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengunjungi warga Desa Kandungan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang yang terdampak proyek jalan Tol Bawen-Yogyakarta. Tidak kurang 50 bidang tanah milik warga terdampak dan mendapat uang ganti rugi (UGR), Rabu (10/5). Pemberian uang ganti rugi diberikan simbolis oleh Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto di Kantor Desa Kandungan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang.

Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto pada kesempatan ini mengatakan di Desa Kandungan terdapat 50 bidang tanah warga yang terdampak program strategi nasional dari rute Semarang-Bawen menuju Yogyakarta. Terdapat 50 bidang tanah milik warga diberikan ganti rugi, kata Hadi Tjahjanto. Warga yang terdampak program strategi nasional ini mendapatkan uang ganti antara Rp 1 miliar dan paling besar Rp 11 miliar.

Kementerian ATR/BPN mendukung kelancaran dari proses pembebasan tanah dan segera menyelesaikan program ini. Diharapkan dalam prosesnya tanpa kendala dan berjalan dengan baik. "Proses pembayaran berjalan lancar dan senang, tadi saya tanya kepada masyarakat ternyata ada yang sudah merencanakan segera pindah rumah," Kata Hadi.

Ia juga mengatakan pihaknya memiliki tim untuk mengidentifikasi tanah dengan harga tanah sesuai standar dari appraisal (tim taksir). Sehingga tidak mungkin ada calo tanah. Jika ada sengketa dengan warga akan dititipkan di pengadilan dalam bentuk konsinyasi. Seorang warga penerima ganti rugi bernama Lastri kepada wartawan menuturkan tanah miliknya luas 455 meter persegi mendapatkan ganti rugi Rp 2 miliar. (Sus)-f

## Ganjar Gandeng UGM Tangani Kasus Stunting

**SEMARANG (KR)** - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menggandeng UGM untuk menangani kasus stunting di 253 desa yang ada di Jawa Tengah. Penanganan stunting di ratusan desa tersebut dilakukan melalui pilot project penggunaan beras fortifikasi. Hal itu dikatakan Ganjar Pranowo kepada wartawan di Semarang, Jumat (12/5). Menurut Ganjar, keberhasilan pilot project penggunaan beras fortifikasi di Jawa Tengah sudah terlihat. Pilot project ini merupakan program kolaborasi antar beberapa pihak, yaitu dari akademisi, BUMD dan dari pemerintah.

Ganjar berharap penanganan stunting bias dilakukan dengan cara keroyok (melibatkan banyak pihak-red). Untuk itu harus bias dipastikan ibu hamil asupan gizinya harus bagus, dilakukan pemeriksaan secara rutin, dan mereka yang berpartisipasi untuk mengawasi ini harus bias memberikan catatan-catatan data

seakurat mungkin.

Metode lain untuk menangani persoalan stunting juga terus dikembangkan UGM. Selain itu, kampus lain juga akan didorong agar melakukan penelitian untuk mencari solusi terkait dengan masalah stunting.

"Dulu dari peternakan UGM pernah ada telur omega. Penelitian lain kalau ada akan kami dorong. Model keroyokan inilah yang kami harapkan bisa melaksanakan program percepatan penanganan stunting," tutur Ganjar Pranowo.

Rektor UGM Prof Ova Emilia mengatakan, beras fortifikasi merupakan beras yang sudah diolah dengan multivitamin dan mineral tinggi. Bersama Pemprov Jawa Tengah dan Bank Jateng, UGM menggelar pilot project beras fortifikasi untuk penanganan stunting di 253 desa di lima kabupaten di Jateng.

Dengan adanya kerja sama tersebut, UMB membentuk tim khusus untuk program beras forti-

fikasi. Tim khusus terdiri dari sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu di bidang agro, medis, dan sosial humaniora.

"Pilot project kami lakukan pada 500 ibu hamil. Sampai saat ini, sudah dua ton beras fortifikasi dan dua ton beras non fortifikasi yang kami berikan pada ibu hamil di Jawa Tengah," tutur Ova Emilia.

Penanganan stunting memang menjadi fokus utama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Banyak program dilakukan Ganjar untuk menekan angka stunting, seperti program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng (5Ng), Jo Kawin Bocah, edukasi melalui program Gubernur Mengajar, dan lainnya.

Berdasarkan perhitun-

gan elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM), pada 2018 tingkat stunting di Jateng berada di angka 24,4 persen. Setahun kemudian pada 2019 turun menjadi 18,3 persen. Persentase kembali turun pada 2020 menjadi 14,5 per-sen, kemudian pada 20-21 turun menjadi 12,8 per-sen, dan terakhir pada 20-22 di angka 11,9 persen. (Bdi)-f

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : SUMARDIYO  
Tempat dan Tanggal Lahir : Wonosobo, 13 Maret 1963  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Wonosobo  
No. KTP : 330709.130363.0004  
Alamat : Ds. Sariyoso RT.01 RW.01 Kec. Wonosobo, Kab. Wonosobo



Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 bulan pada tahun 1992 dengan Nomor Perkaranya 21/Pid. S/1992/PN. Wonosobo, karena melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4, 5 KUHP dan telah menjalani hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat, dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan saya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka saya bersedia menanggung akibat hukumnya dan sanggup dituntut dimuka Pengadilan, karena memberikan keterangan palsu.

Wonosobo, 11 Mei 2023

Sumardiyo